

KEBIJAKAN MANAJEMEN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI MASA PANDEMI COVID 19

Umar Chadhiq, Nanang Yusroni,
Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang
*Email: umarchadhiq@gmail.com
nanangyusroni@gmail.com

Abstrak

Di masa pandemi saat ini dengan penerapan PPKM merupakan hal yang dilematis bagi pedagang kaki lima yang tempat usahanya selalu berada di tempat strategis, maka dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah perlu disinergikan dengan perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang ditetapkan, perlu adanya analisa lingkungan yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisa lingkungan dimaksud berasal dari dalam organisasi Kantor Satpol PP (faktor internal) dan yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Dalam menganalisa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja perlunya menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan sebagai strategi dalam mengatasi PKL

Kata kunci : Satpol PP, SWOT, PKL

A. PENDAHULUAN

Kehadiran berbagai Pedagang Kaki Lima khususnya di jalanan yang ramai dan padat. Karena di satu sisi keberadaan mereka yang tidak terorganisasi secara baik merupakan masalah yang serius bagi pemerintah daerah, dan cenderung terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah, tetapi di sisi lain mereka adalah mencari nafkah untuk menopang hidup matinya ekonomi rumah tangga mereka.

Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang dilematis, di satu sisi sebagai aparat pemerintah petugas Satuan Polisi Pamong Praja, (selanjutnya disebut Satpol PP) harus bertindak tegas dalam menegakkan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan di sisi lain para pedagang kaki lima harus berusaha bertahan hidup dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka dengan berdagang di tempat yang dianggap strategis.

Perlu diketahui bahwa suatu kota adalah daerah tujuan bisnis dan perekonomian yang di satu sisi menuntut adanya lingkungan yang aman dan tertib sebagai syarat mutlak untuk dapat menarik pendapatan daerah maupun kesempatan kerja

Untuk tindakan pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran diantaranya larangan-larangan maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP sebagai Aparatur

Penegakan Peraturan Daerah tentunya tidak boleh membiarkan keadaan pelanggaran yang berupa larangan terhadap Pedagang Kaki Lima, untuk itu diperlukan penertiban. Fenomena ini sering kali menjadi pemandangan yang dilematis yang dipojokkan pada pilihan yang sulit dan dilematis manakala para Pedagang Kaki Lima kurang mengerti tentang tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang terkait menekan laju pandemi Covid 19 dan terlebih lagi dalam penegakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Petugas Satpol PP yang dihadapkan pada masalah yang dilematis yang selalu akan mengakibatkan polemik dan prasangka serta dapat membuat berbagai penafsiran dan cara pandang Pedagang Kaki Lima terhadap Aparatur Penegakkan Peraturan Daerah, bagaimana langkah yang dilakukan Satpol PP dengan menerapkan pendekatan manajemen strategis

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis sejauh mana pembinaan dan pengaturan Pedagang Kaki Lima dalam penanganan masa pandemi covid 19.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Satpol PP

Tujuan penyusunan perencanaan strategik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah membentuk suatu Rencana Induk yang komprehensif yang menyatakan bagaimana Kantor Satpol PP akan mencapai Misi dan Tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan-kelemahan kompetitif.

Perencanaan strategik ini lebih merupakan suatu rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar sebagai pedoman dan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Kantor Satpol PP dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan Strategik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat bermanfaat :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan organisasi
3. Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang
4. Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada

5. Untuk kepentingan *Public Service Excellence* / Pelayanan Prima

Untuk memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang benar serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

Pengembangan Strategi

Albrecht dalam *Lovelock* mendefinisikan pelayanan sebagai “..... *a total organizational approach that makes quality of service as perceived by the customer, the number one driving force for the operation of the business*”, (Suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis).

E. METODE PENELITIAN

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Wawancara melalui komunikasi dua arah antara Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dengan peneliti. Adapun *instrumen* yang digunakan adalah pedoman wawancara yang merupakan acuan bagi peneliti pada waktu pelaksanaan wawancara sehingga pembicaraan tetap dalam lajur yang diteliti. Selanjutnya melakukan observasi terhadap obyek kegiatan penelitian yang sedang berlangsung guna mengetahui relevansi antara jawaban responden dan informan dengan kenyataan yang sebenarnya, Adapun tehnik observasi yang digunakan adalah menggunakan observasi non sistematis yang dilakukan peneliti dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan dan telaah dokumen

F. HASIL PEMBAHASAN

Pada peraturan di suatu daerah terutama di perkotaan, maka diperlukan peraturan tentang pembinaan dan pengaturan pedagang kaki lima, dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, perlu adanya Analisa Lingkungan yang mempengaruhi keberhasilannya.

Analisa lingkungan dimaksud berasal dari dalam organisasi kantor Satpol PP (Faktor Internal) dan yang berasal dari luar organisasi (Faktor Eksternal). Analisis lingkungan internal dan Eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Dalam menganalisa kantor satuan polisi praja, peneliti menggunakan metode analisis SWOT (Strengtht, Weaknesses, Opportunities, and

Threats). Dengan analisa ini, maka factor SWOT tersebut dapat dimodifikasi sebagai berikut :

a. *Strengths (kekuatan)*

Jumlah personil Satpol PP yang memadai Sarana dan prasarana Kantor Satpol PP yang cukup, Disiplin kerja anggota satpol PP

b. *Weaknesses (kelemahan)*

Kurangnya pendidikan teknis anggota satpol PP, Kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, Kurangnya dana oprasional Satpol PP,

c. *Opportunities (peluang),*

Tersedianya peraturan daerah yang dibutuhkan, Adanya koordinasi antar Dinas/Instansi yang baik, Tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi

d. *Threats (ancaman)*

Maraknya penyakit masyarakat, kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang belum stabil, diantara banyaknya provokator

Maka perluna dikaji dari data analisis *lingkungan internal* kantor satpol PP serta *Analisis Lingkungan eksternal* yang berasal dari luar organisasi kantor Satpol PP, peneliti dapat menyajikan strategi-strategi yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Kantor Satpol PP Stategi-strategi yang menjadi faktor kunci keberhasilan tersebut yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mamfaatkan peluang, yang meliputi:

- a. Tersusunya Organisasi kantor Satpol PP yang efektif dan efisien
- b. Tersedianya sarana operasional yang handal
- c. Tersedianya media pembinaan masyarakat

Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman , meliputi Peningkatan efektifitas kerja Satpol PP, Tersedianya sistem informasi yang handal. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, meliputi :

- a. Adanya peningkatan keterampilan dan keahlian Anggota Satpol PP
- b. Tersedianya dana operasional yang menunjang
- c. Adanya peningkatan koordinasi antar instansi
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, meliputi :
- e. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat
- f. Adanya peningkatan patrol kewilayahan

Sebagai tindak lanjut dari analisa data yang telah disajikan peneliti yaitu dimulai dari analisis lingkungan Kantor Satpol PP serta kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kunci keberhasilan sebagai strategi dalam mengatasi PKL adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Organisasi Kantor Satpol PP yang Efektif dan Efisien.
- b. maka Kantor Satpol PP dapat lebih leluasa dalam mengelola setiap permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya masalah PKL.
- c. Tersedianya Sarana Prasarana Operasional dan Sistem Informasi yang Memadai.
- d. Tersedianya dana penunjang operasional merupakan hal yang sangat penting yang dilengkapi dengan sarana penunjang operasional lainnya seperti sarana mobilitas, komunikasi dan sarana pendukung lainnya. Hal ini akan berpengaruh pada kecepatan dalam mengantisipasi pada waktu melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima.
- e. Tersedianya Media Pembinaan Masyarakat.
Dukungan media guna pelaksanaan pembinaan masyarakat akan lebih mempermudah dan meringankan tugas Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan masyarakat agar mau mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah. Hal ini bisa dilakukan lewat radio, pamflet, surat kabar atau lewat acara – acara yang bersifat kemasyarakatan.
- f. Adanya Peningkatan Ketrampilan dan Keahlian bagi anggota Satpol PP Guna Meningkatkan Efektifitas Kerja.
Dalam hal ini dibutuhkan anggota Satpol PP yang sumber daya manusianya memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- g. Adanya Peningkatan Koordinasi Antar Dinas Terkait.
Dinas/Instansi terkait sebagai pelaksana salah satu Peraturan Daerah diharapkan akan selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Satpol PP selaku pengawal dan pengaman Peraturan Daerah, sehingga permasalahan baik yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi dapat ditangani secara cepat, tepat dan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
- h. Peningkatan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Masyarakat (Pedagang Kaki Lima)
Dengan bekal ketrampilan dan keahlian anggota Satpol PP, kiranya ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi dan mentaati Peraturan bukanlah merupakan

suatu hal yang sulit. Akan tetapi hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan masih perlu ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut dari penyuluhan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, perlu kiranya dilaksanakan patroli kewilayahan dengan menargetkan kepada titik – titik rawan pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat,.

i. Adanya Operasi Yustisi Gabungan.

Untuk lebih memantapkan seluruh langkah yang diambil dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima, yaitu setelah melalui tahap – tahap awal mulai dari pembinaan, penyuluhan dan peringatan – peringatan sebagai tindakan akhir yang berupa penindakan dipandang sangat penting untuk melakukan tindakan sebagai langkah akhir yang berupa *Operasi Yustisi Gabungan*.

Adapun Tim Yustisi terdiri dari dari berbagai instansi terkait yaitu :Satuan Polisi Pamong Praja, Unsur Kodim, Polisi Resort, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kesbang Linmas, Bagian Hukum Pemerintah Daerah

Operasi Yustisi Gabungan ini diambil guna memberikan warna sekaligus menakjubkan power Satpol PP dalam mengatasi kasus Pedagang Kaki Lima. Sebab apabila dalam melakukan tindakan akhir ini hanya di lakukan oleh Satpol PP saja mungkin masih diragukan untuk mencapai keberhasilan.Hal ini di sebabkan oleh personil Satpol PP banyak yang kurang hafal dan memahami Peraturan Daerah sebagai dasar penindakan ini, sehingga terkesan senaknya dan membabi buta. Dalam langkah akhir ini .

Memang sangat di perlukan ketujuh unsur tersebut sehingga benar-benar tercipta kekuatan penuh.Sebab dalam melakukan tindakan tugas bisa jadi di sertai kekerasan terhadap PKL yang membangkang atau bahkan malakukan konfirmasi dengan petugas.

G. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melakukan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, harus di tempuh dengan memanfaatkan media yang ada guna mensosialisasikan media yang ada guna mensosialisasikan Peraturan Daerah (Khususnya Peraturan Daerah Masalah Penertiban PKL dan Peraturan tentang Covit 19). Keterbatasan dana operasional agar tidak

dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dalam melakukan tugas yang dibebankan anggota satpol PP. Untuk mewujudkan satpol PP yang mantap, maka dibutuhkan anggota satpol PP yang handal dari segi kuantitas dan kualitasnya. Agar informasi lebih cepat diterima PKL, alangkah baiknya dibentuk paguyuban PKL. Hal ini untuk memudahkan koordinasi antara petugas dengan PKL sehingga informasi maupun teguran tidak terkesan sepotong-sepotong atau dadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desthiani, U. (2019). Peran komunikasi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima (pkl). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2). <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.3304>
- Dwipa Zulian, L., Wahyudi Prodi Psikologi, H., & Psikologi, F. (2020). Hubungan Self-Compassion dan Distres Psikologis saat Pandemi COVID-19 pada Petugas Satpol PP Kota Bandung. *Prosiding Psikologi*, 6(2).
- Gunawan, G. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 04(02).
- Pamordy, R. (2018). Penertiban satpol pp pada pedagang kaki lima. *SI Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Pratiwi, P. T., & Ary, L. K. P. (2018). Perbedaan Tingkat Agresivitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bali ditinjau dari Dimensi Kepribadian Big Five dan Kecerdasan Emosional. *Jurnal Psikologi Udayana*,
- Widyawati, T. I. (2019). Kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam mentertibkan pedagang kakli lima (pkl) di kecamatan ciledug. *Jurnal Mozaik*,
- Yossi Maria Marintan Hutajulu, Lelo Sintani, & Meitiana, M. (2021). Pengaruh disiplin dan budaya kerja terhadap kinerja ASN melalui motivasi kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2658>
- Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*,